



Framing Gender dalam Politik Digital: Representasi Kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam Pemberitaan dan Platform Sosial

Dhiya Fathiyyatul Aulia^{1*}, Adelia Rismayani², Ika Arinia Indriyany³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: 6670230021@untirta.ac.id^{1*}, 6670230024@untirta.ac.id², ika.arinia@untirta.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 6670230021@untirta.ac.id¹

Abstract: *The representation of women in political leadership in Indonesia remains relatively limited, particularly in executive positions at the regional level. This condition reflects structural, cultural, and symbolic barriers that influence women's participation in politics. The election of Sherly Tjoanda as the Governor of North Maluku in the 2024 regional election provides an important case for examining how female leadership is represented in the digital media space. This study aims to analyze how online media frame Sherly Tjoanda's leadership and how gender narratives are constructed within digital political communication. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach and uses Robert M. Entman's framing theory as the analytical framework, which includes define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation. The research data were obtained from online media coverage and the dynamics of digital discussions throughout 2024. The findings show that media coverage does not merely convey information about Sherly Tjoanda's political activities but also constructs layered narratives that combine the image of inspirational female leadership with expectations that remain influenced by gender stereotypes. Digital media, on one hand, provides opportunities for female politicians to build their political image, while on the other hand it can also become a space where gender bias is reproduced within public discourse. This study highlights the important role of media framing in shaping public perceptions of women's political leadership in Indonesia's digital political landscape.*

Keywords: *Digital Politics; Framing Analysis; Gender Representation; Political Communication; Women Leadership.*

Abstrak: Representasi perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia masih relatif terbatas, terutama pada posisi eksekutif di tingkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan struktural, kultural, dan simbolik yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik. Terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 menjadi kasus penting untuk melihat bagaimana kepemimpinan perempuan direpresentasikan dalam ruang media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online membingkai kepemimpinan Sherly Tjoanda serta bagaimana narasi gender dikonstruksikan dalam komunikasi politik digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif pendekatan studi kasus serta teori framing Robert M. Entman sebagai pisau analisis yang meliputi define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Data penelitian diperoleh dari pemberitaan media online serta dinamika percakapan digital sepanjang tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media tidak hanya menyampaikan informasi mengenai aktivitas politik Sherly Tjoanda, tetapi juga membangun narasi yang berlapis antara citra kepemimpinan perempuan yang inspiratif dengan ekspektasi yang masih dipengaruhi stereotip gender. Media digital di satu sisi membuka ruang bagi perempuan politisi untuk membangun citra politiknya, namun di sisi lain juga menjadi arena reproduksi bias gender dalam diskursus publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran framing media dalam membentuk persepsi publik terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik digital di Indonesia.

Kata Kunci: Framing Media; Kepemimpinan Perempuan; Komunikasi Politik; Politik Digital; Representasi Gender.

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia masih terdapat masalah sistemik terkait representasi perempuan dalam politik, terutama dalam peran kepemimpinan eksekutif. Akses perempuan ke posisi eksekutif di tingkat regional masih sangat terbatas, meskipun telah diperkenalkan beberapa aturan afirmasi, seperti kuota 30 persen untuk representasi perempuan di legislatif. Partisipasi politik perempuan dibatasi oleh hambatan struktural, budaya, dan simbolis, yang semuanya tercermin dalam kondisi ini. Dalam politik lokal, kualitas seperti ketegasan, keberanian, dan otoritas sering kali dipandang sebagai standar kepemimpinan ideal karena dibentuk oleh nilai-nilai yang terkait dengan maskulinitas. Para akademisi feminis menyebut ini sebagai *"double bind"*, di mana perempuan yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas dianggap terlalu agresif, sementara yang tampak lembut dianggap tidak layak memimpin. Ketegangan antara ekspektasi gender dan ekspektasi kepemimpinan ini dapat muncul ketika perempuan memasuki arena ini (Li et al., 2021).

Secara politik dan akademis, terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara dalam pemilihan umum daerah tahun 2024 patut diperhatikan. Selain menjadi pemimpin perempuan pertama di provinsi tersebut, Sherly Tjoanda juga menonjol dalam konteks Indonesia Timur, wilayah yang sebelumnya jarang mendapat perhatian dalam studi gender dan politik. Kemenangannya terjadi di tengah politik lokal Maluku Utara yang didominasi laki-laki, di mana ikatan kekerabatan, dinamika kekuasaan, dan konvensi sosial semuanya memengaruhi cara komunitas memandang dan mengevaluasi seorang pemimpin. Penampilan Sherly Tjoanda di media digital juga telah berkembang menjadi ruang yang subur untuk mempelajari bagaimana norma gender dipertahankan, dinegosiasikan, atau bahkan dipertanyakan dalam diskursus publik saat ini (Kelompok et al., 2025).

Persepsi masyarakat terhadap pemimpin perempuan sangat dipengaruhi oleh media, baik tradisional maupun digital. Selain mencerminkan kenyataan, bingkai media secara aktif membentuk legitimasi politik. Menurut Entman (1993), media melaksanakan empat tugas bingkai yang secara kolektif mempengaruhi pola pikir audiens: mendefinisikan isu, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi. Media secara halus mempertahankan hierarki gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam politik ketika meliput pemimpin perempuan daerah lebih fokus pada atribut pribadi mereka, seperti penampilan fisik atau tanggung jawab rumah tangga, daripada rekam jejak kebijakan mereka. Seiring waktu, akumulasi framing semacam ini dapat memengaruhi persepsi publik bahwa kepemimpinan perempuan bersifat istimewa atau memerlukan bukti

lebih lanjut, sehingga tidak pernah sepenuhnya setara dengan legitimasi yang secara otomatis diberikan kepada pemimpin laki-laki (Pas, 2020).

Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter/X telah mengubah cara tokoh publik berkomunikasi dan dipersepsikan di era digital. Dengan menghindari penyaringan media tradisional, ruang digital memberikan kesempatan bagi politisi perempuan untuk mengambil kendali langsung atas narasi mereka sendiri. Sherly Tjoanda sendiri menggunakan media sosial untuk menciptakan persona politik yang menyeimbangkan legitimasi profesionalnya dengan identitas gendernya, menampilkan pencapaiannya dan kisah inspiratif sebagai pemimpin perempuan (Studi et al., 2025). Namun, bias tetap ada di ruang digital. Pertanyaan mendasar tentang apakah digitalisasi secara tak terhindarkan memperluas kesetaraan politik bagi perempuan atau apakah ruang digital justru menjadi arena baru di mana subordinasi simbolis dipertahankan, muncul melalui cara-cara halus namun kuat di mana stereotip gender dapat direproduksi melalui komentar publik, tagar yang sedang tren, dan pola distribusi konten (Wahyuningtyas et al., 2025).

Saat ini, sangat sedikit studi ilmiah tentang pembingkai gender dalam politik kota di Indonesia. Meskipun dinamika representasi di tingkat lokal memiliki beragam keadaan sosial dan budaya dan membutuhkan analisis khusus, sebagian besar penelitian tentang gender dan politik lebih terkonsentrasi pada tingkat nasional atau tokoh-tokoh terkemuka di pusat kekuasaan (Harvey, 2012). Metode pembingkai yang terjadi dapat sangat berbeda dari media nasional, yang relatif lebih beragam, karena media lokal, yang berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat setempat, seringkali memiliki kedekatan struktural dengan aktor politik tertentu. Namun, terlepas dari karakteristik sosial dan budaya Indonesia Timur yang berbeda yang membentuk persepsi publik tentang representasi gender dalam politik, penelitian tentang kepemimpinan perempuan di wilayah ini masih sangat langka. Untuk memahami bagaimana kesenjangan representasi diciptakan dan dipertahankan di tingkat akar rumput demokrasi Indonesia, penelitian yang secara khusus meneliti pembingkai gender dalam pemberitaan politik lokal sangat penting (Apriliana, 2025).

Keterbatasan kajian tersebut juga sejalan dengan kondisi empiris keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia yang masih relatif rendah. Data nasional menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi politik formal masih belum seimbang dibandingkan laki-laki, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif (Mayrudin et al., 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural dalam memperoleh posisi kepemimpinan politik. Hal tersebut dapat

dilihat pada data keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia yang masih berada di bawah angka ideal keterwakilan gender (BPS, 2025).

Tabel 1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen (DPR RI).

Periode	Tahun	Persentase Perempuan (%)
2014 - 2019	2014	17,32%
2019 - 2024	2019	20,52 &
2024 - 2029	2024	22,23%

Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia mengalami peningkatan secara bertahap dalam tiga periode pemilu terakhir. Pada periode 2014 - 2019 persentase perempuan di DPR RI berada pada angka 17,32 persen, kemudian meningkat menjadi 20,52 persen pada periode 2019 - 2024, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 22,23 persen pada periode 2024 - 2029. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, angka tersebut masih berada di bawah target afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen yang selama ini dijadikan sebagai standar minimum partisipasi politik perempuan dalam lembaga legislatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam representasi politik masih menjadi tantangan yang signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025).

Partisipasi politik merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Pemenuhan hak politik tersebut dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Selain itu, berbagai ketentuan dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945 juga menegaskan pemenuhan hak warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hukum, ekonomi, pendidikan, budaya, keadilan sosial, dan agama. Meskipun secara normatif hak-hak tersebut telah diatur dalam konstitusi, realitas sosial politik menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi politik perempuan di parlemen Indonesia yang masih berada di bawah angka minimal 30 persen, di mana pada periode 2019-2024 keterwakilan perempuan berada pada kisaran 21 persen. Selain itu, berbagai persoalan lain seperti diskriminasi terhadap perempuan pekerja, kekerasan terhadap perempuan baik di dalam maupun luar negeri, tingginya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan akses kesehatan, serta ketimpangan akses pendidikan juga masih menjadi masalah yang dihadapi perempuan. Stereotip gender yang dipengaruhi oleh interpretasi agama maupun norma budaya turut memperkuat ketidaksetaraan tersebut (Azmy, 2024).

Anne Phillips (1995) menekankan pentingnya kehadiran perempuan di ruang publik dan politik. Menurutnya, keberadaan perempuan dalam posisi publik tidak hanya memberikan

representasi yang lebih adil, tetapi juga dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi perempuan lainnya untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sosial. Dalam kerangka demokrasi, terdapat sejumlah nilai fundamental yang menjadi landasan kehidupan politik, seperti kebebasan (*freedom*), pemenuhan hak (*rights*), keadilan (*justice*), dan kesetaraan (*equality*). Keempat nilai tersebut seharusnya berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, akses terhadap kebebasan, hak, keadilan, dan kesetaraan perlu dijamin bagi laki-laki maupun perempuan secara setara.

Pandangan Anne Phillips tersebut juga berkaitan erat dengan kualitas demokrasi dalam suatu masyarakat. Semakin besar partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik, semakin menunjukkan adanya kemajuan dalam praktik demokrasi yang menekankan kesetaraan dan pemenuhan hak warga negara. Namun dalam praktiknya, perempuan sering kali masih diposisikan sebagai objek pembangunan. Di Indonesia, kondisi tersebut dapat dilihat sejak masa Orde Baru yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Pada dekade 1980-an, perkembangan teknologi dan industrialisasi turut memengaruhi peran perempuan dalam dunia kerja. Memasuki awal 1990-an, terjadi pergeseran pola migrasi tenaga kerja di mana perempuan semakin banyak bekerja ke luar negeri, fenomena yang kemudian dikenal sebagai feminisasi migrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan mulai dipandang sebagai aktor penting dalam aktivitas ekonomi (Azmy 2024).

Meskipun demikian, berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi di berbagai sektor kehidupan. Upaya pemerintah dalam menghadirkan kebijakan perlindungan terhadap perempuan memang telah dilakukan, sering kali melalui dorongan dari masyarakat sipil (*civil society*) (Larasati & Fernando, 2025). Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menjadi tantangan tersendiri. Berbagai persoalan ketidakadilan yang dialami perempuan pada dasarnya berakar pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep gender dan keadilan gender. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial yang membentuk perbedaan peran dan ekspektasi antara laki-laki dan perempuan, yang dapat dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, pembahasan mengenai gender tidak hanya berkaitan dengan perempuan, tetapi juga melibatkan laki-laki sebagai mitra dalam menciptakan kehidupan sosial dan politik yang lebih adil (Arda et al., 2025).

Anne Phillips (1991) dalam kajiannya mengenai demokrasi yang berperspektif gender menegaskan pentingnya hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam ruang politik. Kedua kelompok tersebut perlu berada pada posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan politik, tanpa adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya.

Meski demikian, upaya peningkatan partisipasi perempuan melalui kebijakan kuota, seperti kebijakan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam politik, tetap diperlukan sebagai langkah strategis untuk mendorong partisipasi politik perempuan sekaligus memperkuat representasi substantif, sebagaimana dikemukakan oleh Pitkin (1967).

Namun demikian, keberadaan kebijakan afirmasi tersebut tidak secara otomatis menjamin tercapainya kesetaraan gender dalam praktik politik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan simbolik dalam proses politik, mulai dari proses pencalonan, kampanye politik, hingga cara mereka direpresentasikan dalam ruang publik. Dalam banyak kasus, perempuan politisi tidak hanya dinilai berdasarkan kapasitas kepemimpinan dan program kebijakan yang mereka tawarkan, tetapi juga sering kali dinilai melalui standar sosial yang berkaitan dengan identitas gender mereka (Azmy et al., 2024).

Dengan ini, peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan tidak dapat diabaikan. Cara media membingkai figur politik perempuan dapat memengaruhi bagaimana publik memahami legitimasi, kapasitas, dan otoritas kepemimpinan mereka. Oleh karena itu, analisis mengenai pembingkai media terhadap pemimpin perempuan menjadi penting untuk memahami bagaimana narasi tentang kepemimpinan perempuan dikonstruksikan dalam ruang publik, terutama dalam era politik digital yang memungkinkan interaksi antara media, politisi, dan masyarakat berlangsung secara lebih terbuka dan dinamis (Nurshiva et al., 2026).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menutup kesenjangan ilmiah tersebut dengan menggunakan Sherly Tjoanda sebagai topik studi kasus yang relevan dan bermanfaat. Untuk memahami bagaimana identitas gender diciptakan dan dinegosiasikan dalam penggambaran kepemimpinan perempuan di tingkat regional, penelitian ini mengkaji pembingkai media digital, taktik komunikasi politik, dan percakapan publik di media sosial dari Januari hingga Desember 2024. Selain menambah literatur tentang gender dan politik di Indonesia, penelitian ini memberikan sudut pandang dari Indonesia Timur, wilayah yang belum banyak mendapat perhatian ilmiah. Selain itu, penelitian ini menantang anggapan bahwa digitalisasi pasti menghasilkan representasi yang setara bagi perempuan dalam politik dan secara kritis mengkaji hubungan antara media digital, penciptaan legitimasi politik, dan pelanggaran ketidaksetaraan gender dalam demokrasi lokal Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Framing (Robert Entman, 1993)

Teori framing yang dikembangkan oleh Robert Entman (1993) mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk membentuk interpretasi publik atas suatu isu atau figur. Konsep framing dalam kajian komunikasi dan media tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari berbagai pemikiran dalam ilmu sosial. Akar awal konsep ini dapat ditelusuri dari karya Erving Goffman melalui bukunya *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience* yang diterbitkan pada tahun 1974. Goffman menjelaskan bahwa individu memahami realitas sosial melalui “*frame*” atau kerangka interpretasi yang membantu mereka menafsirkan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

Frame tersebut berfungsi sebagai struktur kognitif yang memungkinkan seseorang mengorganisasi pengalaman dan memberikan makna terhadap suatu kejadian. Pemikiran Goffman kemudian berkembang dalam kajian komunikasi massa, khususnya dalam analisis bagaimana media membentuk dan menyajikan realitas kepada publik. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam mengembangkan konsep ini dalam studi media adalah Robert M. Entman. Dalam artikelnya yang berjudul *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm* yang dipublikasikan pada tahun 1993, Entman memberikan definisi framing yang lebih sistematis dalam konteks komunikasi massa.

Menurut Entman, framing adalah proses memilih beberapa aspek dari realitas yang dipersepsikan dan menjadikannya lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi sehingga mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, serta rekomendasi penanganan terhadap suatu isu. Dengan kata lain, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi cara publik memahami suatu peristiwa melalui penonjolan aspek tertentu dan pengabaian aspek lainnya. Dalam kerangka analisisnya, Entman menjelaskan bahwa framing media biasanya mencakup empat elemen utama, yaitu: (1) *define problems* atau mendefinisikan masalah, (2) *diagnose causes* atau mengidentifikasi penyebab masalah, (3) *make moral judgement* atau memberikan penilaian moral, dan (4) *treatment recommendation* atau menawarkan solusi atau rekomendasi penanganan. Keempat elemen ini membantu peneliti menganalisis bagaimana media membingkai suatu isu sehingga membentuk persepsi publik terhadap peristiwa tersebut.

Perkembangan teori framing kemudian banyak digunakan dalam penelitian komunikasi politik dan media, termasuk dalam kajian mengenai representasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemberitaan media. Melalui pendekatan framing, peneliti dapat

mengidentifikasi bagaimana media membangun narasi tertentu tentang tokoh politik perempuan serta bagaimana narasi tersebut mempengaruhi cara masyarakat memahami legitimasi dan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Dalam pengertian ini, media tidak bertindak sebagai cermin netral yang memantulkan realitas, melainkan sebagai aktor yang secara aktif mengonstruksi makna melalui pilihan diksi, sudut pandang, dan proporsi pemberitaan. Relevansi teori ini dalam penelitian tentang Gender, Media, dan Politik Digital terletak pada kemampuannya membongkar cara media digital mengonstruksi representasi Sherly Tjoanda sebagai gubernur perempuan pertama Maluku Utara; apakah pemberitaan dan konten digital lebih menonjolkan kapasitas kepemimpinan dan rekam jejak kebijakannya, ataukah justru mereduksi figur politiknya pada identitas gendernya semata sebagai perempuan yang memasuki ranah yang selama ini didominasi laki-laki (Pas, 2020).

Entman mengoperasionalkan framing ke dalam empat elemen analitis yang dalam penelitian ini diterapkan secara langsung pada teks-teks media digital tentang Sherly Tjoanda. Elemen *define problems* digunakan untuk melihat apakah media mendefinisikan kepemimpinannya sebagai isu gender atau isu kapasitas politik daerah. Elemen *diagnose causes* menelusuri bagaimana keberhasilan maupun tantangan kepemimpinannya diatribusikan, apakah pada faktor personal dan gender atau pada dinamika struktural politik lokal Maluku Utara. Elemen *make moral judgments* mengidentifikasi apakah evaluasi media terhadap gaya komunikasi dan keputusan kebijakannya mengandung standar ganda berbasis gender, di mana perempuan pemimpin sering dinilai melalui kacamata yang berbeda dibandingkan pemimpin laki-laki. Sementara itu, elemen *suggest remedies* mengungkap apakah narasi digital menempatkan legitimasi kepemimpinan Sherly Tjoanda sebagai sesuatu yang sudah sah dan setara, ataukah sebagai sesuatu yang masih perlu terus dibuktikan kepada publik (Indiarti et al., 2025).

Perkembangan politik digital, membuat penerapan teori framing menjadi semakin kompleks karena framing tidak hanya terjadi pada level teks jurnalistik media daring, tetapi juga pada level komentar publik, tagar, dan pola interaksi di platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter/X. Representasi Sherly Tjoanda di media online membentuk persepsi publik yang berlapis, di mana narasi inspiratif tentang perempuan pemimpin berdampingan dengan ekspektasi yang masih berbasis stereotip gender. Kondisi ini mencerminkan bagaimana ruang publik digital berfungsi sebagai arena negosiasi antara reproduksi hegemoni maskulin dalam politik lokal Maluku Utara dan kemungkinan perluasan representasi yang lebih inklusif. Dengan demikian, teori framing Entman dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai

alat deskriptif, tetapi juga sebagai instrumen kritis untuk menganalisis relasi antara gender, media, dan legitimasi politik digital yang menjadi inti kajian penelitian ini (Fadhillah, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2015). Penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena dalam kehidupan nyata, terutama yang bersifat kompleks dan kontekstual. Berdasarkan prosedur pelaksanaan studi kasus sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014), penelitian ini diawali dari ketertarikan dan keterlibatan peneliti terhadap fenomena representasi kepemimpinan perempuan dalam ruang publik digital, khususnya yang berkaitan dengan terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai gubernur perempuan pertama Maluku Utara. Menurut Creswell (2009), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami permasalahan manusia atau sosial dengan membangun gambaran yang menyeluruh dan kompleks, yang disajikan secara terperinci berdasarkan perspektif partisipan sebagai sumber informasi. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana framing gender dikonstruksikan dalam pemberitaan media digital dan diskursus publik di media sosial terhadap kepemimpinan Sherly Tjoanda selama periode Januari hingga Desember 2024.

Pendekatan kualitatif berangkat dari asumsi bahwa realitas bersifat jamak, interaktif, serta dibentuk melalui pertukaran informasi sosial yang ditafsirkan oleh individu. Proses penelitian dilakukan dalam latar alami dan menekankan realitas sosial yang terbentuk dari interaksi antaraktor dalam ruang publik digital, termasuk media daring, platform media sosial, dan pengguna yang turut memproduksi diskursus tentang kepemimpinan perempuan (Denzin & Lincoln, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana identitas gender, kapasitas kepemimpinan, serta legitimasi politik dikonstruksikan dan dinegosiasikan dalam representasi digital Sherly Tjoanda. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendasar melalui analisis teks dan narasi yang diproduksi oleh media dan publik digital, sehingga dapat menjelaskan bagaimana framing yang terbentuk memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan perempuan di tingkat politik lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis representasi kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam media digital, dengan menjadikan pemberitaan media daring nasional dan lokal serta konten media sosial pada akun resmi Sherly Tjoanda sebagai situs kasus yang menggambarkan dinamika gender, media, dan politik digital di Maluku Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Citra Kepemimpinan dalam Pemberitaan Media Online mengenai Sherly Tjoanda

Pemberitaan media online mengenai Sherly Tjoanda banyak muncul sejak dirinya terlibat dalam kontestasi politik di Maluku Utara dan kemudian menjabat sebagai gubernur pada tahun 2025. Media nasional dan media daring menyoroti perjalanan politik Sherly yang menggantikan mendiang suaminya, Benny Laos, setelah ia meninggal dunia dalam insiden kecelakaan kapal pada masa kampanye Pilkada 2024. Setelah menggantikan posisi tersebut, Sherly memenangkan pemilihan gubernur dengan lebih dari 50 persen suara dan menjadi gubernur perempuan pertama di provinsi tersebut. Media online banyak menyoroti Sherly sebagai figur politik baru yang memiliki latar belakang pengusaha serta jaringan politik yang kuat.

Beberapa pemberitaan menampilkan profil dirinya sebagai pemimpin daerah sekaligus perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi politik lokal yang kompetitif. Selain itu, pemberitaan media juga sering mengaitkan perjalanan politik Sherly dengan upaya melanjutkan perjuangan politik suaminya yang sebelumnya menjadi kandidat gubernur (Jurnal soreang 2025). Selain pemberitaan media arus utama, figur Sherly juga menjadi topik perbincangan luas di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X. Beberapa konten video yang diunggah di Instagram dan TikTok memperlihatkan aktivitas Sherly ketika berinteraksi dengan masyarakat atau saat melakukan kunjungan kerja.

Konten tersebut seringkali menjadi viral dan memunculkan berbagai komentar dari warganet. Dalam salah satu unggahan Instagram yang menampilkan Sherly bersama tokoh publik lain, video tersebut memperoleh ribuan komentar serta ratusan ribu tanda suka dari pengguna media sosial (Batam Pos, 2025). Komentar warganet di media sosial menunjukkan beragam respons terhadap figur Sherly. Sebagian komentar bernada positif yang menilai Sherly sebagai pemimpin perempuan yang karismatik dan menarik perhatian publik. Misalnya beberapa pengguna menuliskan komentar yang bersifat candaan seperti menjodohkan Sherly dengan tokoh politik lain atau memuji penampilannya sebagai gubernur perempuan. Salah satu komentar warganet menyebutkan, *“Duda dan janda ketemu,”* yang merujuk pada interaksi Sherly dengan tokoh publik yang biasa disebut kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat dalam sebuah video yang viral di media sosial (Batam Pos, 2025). Di sisi lain, terdapat pula komentar yang bersifat kritis terhadap gaya komunikasi atau kebijakan yang ditampilkan dalam beberapa video viral di media sosial seperti *“Gaya nya princess Amber banget, centil tapi tegas”*.

Terdapat juga video ketika Sherly yang menegur seorang anak terkait kemampuan berhitung yang kemudian memunculkan reaksi beragam dari warganet.

Video tersebut memicu perdebatan di media sosial dan mendorong Sherly untuk memberikan klarifikasi serta permintaan maaf atas respons publik yang muncul (Instagram, 2025). Dari gambaran tersebut dapat terlihat bahwa pemberitaan mengenai Sherly tidak hanya dibentuk oleh media online, tetapi juga oleh interaksi dan respons publik di media sosial. Media online cenderung menyoroti perjalanan politik, profil kepemimpinan, serta aktivitas pemerintahan yang dilakukan oleh Sherly. Sementara itu, media sosial menghadirkan ruang yang lebih spontan bagi publik untuk memberikan komentar, dukungan, kritik, maupun candaan terhadap figur politik tersebut. Kombinasi antara pemberitaan media online dan respons warganet di media sosial pada akhirnya membentuk citra publik Sherly sebagai figur politik perempuan yang cukup menonjol dalam ruang politik lokal Indonesia.

Analisis Framing Media terhadap Capaian Sherly Tjoanda

Pemberitaan media mengenai kepemimpinan Sherly Tjoanda menunjukkan kecenderungan framing yang menyoroti capaian kebijakan pemerintah daerah sebagai indikator keberhasilan kepemimpinan. Beberapa media menyoroti program pembebasan biaya komite sekolah untuk SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara sebagai langkah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program ini diposisikan sebagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam mengurangi beban ekonomi keluarga serta mencegah potensi putus sekolah di tingkat pendidikan menengah (Pilarmalut, 2025).

Selain itu, sejumlah pemberitaan juga menyoroti program pembangunan yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Media menggambarkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di wilayah Maluku Utara. Narasi tersebut menunjukkan bagaimana media membingkai kepemimpinan Sherly sebagai pemimpin yang berorientasi pada pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Detiknews, 2025).

Di sisi lain, media juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai sekitar 32,09 persen pada triwulan II tahun 2025 yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan aktivitas hilirisasi pertambangan. Informasi ini dalam pemberitaan media sering diposisikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah yang turut memperkuat citra kepemimpinan Sherly dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional (Metropolitan, 2025).

Media juga menyoroti langkah pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Salah satu pemberitaan menampilkan upaya Sherly melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai indikator pencegahan korupsi di daerah. Pemberitaan ini membingkai kepemimpinan Sherly sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, analisis framing digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media membangun makna melalui struktur pemberitaan yang muncul. Berdasarkan kerangka teori framing dari Robert M. Entman, analisis penelitian ini kemudian dijelaskan melalui empat indikator utama, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*.

- a. *Define problems*, Pemberitaan media online menampilkan Sherly Tjoanda sebagai figur perempuan yang mulai mendapat perhatian dalam dinamika politik daerah. Media seperti Kompas dan Detik menyoroti berbagai aktivitas publik yang dilakukan oleh Sherly, mulai dari keterlibatan dalam kegiatan sosial, pertemuan dengan masyarakat, hingga partisipasinya dalam agenda politik lokal. Penekanan terhadap aktivitas tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan peristiwa secara faktual, tetapi juga membingkai kemunculan Sherly sebagai bagian dari fenomena meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang politik.

Sorotan terhadap latar belakang dan aktivitas sosialnya juga memperlihatkan upaya media untuk menempatkan Sherly sebagai figur yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Pemberitaan sering kali menonjolkan aspek kepedulian sosial, interaksi dengan warga, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan publik. Dengan penekanan seperti ini, media membingkai isu utama bukan sekadar tentang aktivitas politik biasa, melainkan sebagai narasi mengenai munculnya figur perempuan yang berpotensi mengambil peran dalam kepemimpinan politik daerah.

- b. *Diagnose causes*, Pemberitaan media online mengaitkan kemunculan Sherly Tjoanda dalam politik daerah dengan berbagai faktor yang membentuk citra dan popularitasnya di ruang publik. Salah satu faktor yang sering disoroti adalah latar belakang sosial dan jaringan yang dimiliki oleh Sherly. Media menampilkan latar belakang tersebut sebagai salah satu modal yang memungkinkan dirinya untuk terlibat lebih aktif dalam aktivitas politik dan sosial di tingkat daerah.

Selain faktor jaringan sosial, media juga menyoroti bagaimana eksposur media dan aktivitas di ruang digital turut memperkuat popularitasnya. Perkembangan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X memungkinkan informasi mengenai aktivitas

Sherly tersebar lebih luas kepada masyarakat. Berbagai unggahan terkait kegiatan sosial, interaksi dengan masyarakat, serta partisipasi dalam agenda publik menjadi bagian dari narasi yang membentuk citra dirinya di ruang digital. Percakapan warganet di media sosial juga menunjukkan bahwa sebagian publik menilai kemunculan Sherly tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik semata, tetapi juga oleh kemampuan membangun citra publik melalui komunikasi yang aktif dengan masyarakat. Dalam konteks ini, media tidak hanya menggambarkan penyebab munculnya figur tersebut dari sisi struktural politik, tetapi juga dari dinamika komunikasi publik yang berkembang di era media digital. (Reformansyah et al., 2023).

- c. *Make moral judgement*, media memberikan penilaian tertentu terhadap figur Sherly melalui narasi yang dibangun dalam pemberitaan. Beberapa pemberitaan menampilkan Sherly sebagai figur yang berupaya membangun legitimasi kepemimpinan dan memperoleh dukungan masyarakat. Namun di sisi lain, pemberitaan juga menampilkan berbagai respons publik yang muncul di ruang digital, baik berupa dukungan maupun kritik terhadap tindakan atau pernyataan yang disampaikan. Dalam analisis framing, elemen ini menunjukkan nilai moral atau penilaian yang digunakan media untuk memperkuat sudut pandang tertentu terhadap suatu isu (Setyaningrum et al., 2024).
- d. *Treatment recommendation*, media menampilkan berbagai harapan atau solusi yang berkaitan dengan kepemimpinan Sherly sebagai kepala daerah. Pemberitaan sering menyoroti pentingnya kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas politik daerah. Dalam model framing Entman, tahap ini berkaitan dengan bagaimana media menekankan solusi atau langkah yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dalam pemberitaan (Deha, 2021). Melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi mengenai aktivitas politik Sherly, tetapi juga membingkai realitas melalui pemilihan isu, penekanan aspek tertentu, serta cara penyajian informasi kepada publik. Proses framing ini berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami figur Sherly sebagai tokoh politik di tingkat daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis representasi Sherly Tjoanda dalam media online serta kaitannya dengan isu politik perempuan di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan aktivitas politik Sherly Tjoanda, tetapi juga membentuk persepsi publik mengenai kepemimpinan perempuan melalui cara penyajian isu

dan penekanan informasi tertentu. Kemunculan Sherly Tjoanda dalam politik daerah diposisikan sebagai bagian dari dinamika politik lokal sekaligus mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang politik. Kehadiran figur perempuan dalam kepemimpinan daerah menarik perhatian karena politik masih sering dipandang sebagai ruang yang didominasi laki-laki. Media juga menampilkan identitas gender sebagai bagian dari representasi tokoh politik perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan masih sering dipahami melalui perspektif gender, bukan semata-mata berdasarkan kapasitas politik dan kinerja pemerintahan. Selain itu, interaksi di ruang politik digital memperlihatkan beragam respons publik terhadap figur Sherly Tjoanda, baik berupa dukungan maupun kritik. Respons tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap kepemimpinan perempuan dibentuk tidak hanya oleh media, tetapi juga oleh dinamika komunikasi publik di ruang digital. Secara keseluruhan, media online berperan penting dalam membentuk representasi politik perempuan. Cara media menampilkan figur Sherly Tjoanda turut mempengaruhi cara masyarakat memahami posisi dan peran perempuan dalam kepemimpinan politik di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, media online diharapkan dapat menyajikan pemberitaan politik secara lebih proporsional dengan menekankan aspek kapasitas, kinerja, dan kebijakan yang dihasilkan oleh tokoh politik perempuan. Pemberitaan yang lebih berimbang dapat membantu mengurangi bias gender serta memperkuat pemahaman publik bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dalam kepemimpinan politik. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan literasi media agar mampu memahami bahwa pemberitaan tidak selalu merepresentasikan realitas secara utuh. Sikap kritis terhadap informasi yang beredar di media digital diperlukan agar publik tidak mudah terpengaruh oleh konstruksi narasi yang terbentuk dalam pemberitaan. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai representasi perempuan dalam politik masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Penelitian dapat diperluas dengan menganalisis lebih banyak media, periode waktu yang lebih panjang, atau mengombinasikan analisis framing dengan metode lain seperti analisis wacana atau analisis interaksi publik di media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Gender dan Politik yang memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mengkaji isu-isu gender dalam ranah politik secara kritis dan akademis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada mata kuliah Gender dan Politik yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan kajian mendalam mengenai representasi kepemimpinan perempuan dalam media dan politik digital. Melalui mata kuliah ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang relasi antara gender, media, dan kekuasaan politik yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pembelajaran umum di dalam kelas.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Gender dan Politik, Ka Ika Arinia Indriyany, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan inspirasi selama proses penelitian dan penulisan artikel ini, serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang gender dan politik, serta bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Fatah. (2024b, December 9). Pleno KPU tuntas, Sherly Tjoanda-Sarbin pemenang di Maluku Utara. *Manado.Antaraneews.Com*.
- Alifianisa, S., Roem, E. R., & Elian, N. (2025). Resepsi politik perempuan terhadap program Perempuan Bicara di tvOne. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 24(1), 48-61. <https://doi.org/10.32509/wacana.v24i1.4600>
- Andriana, N. (2022). Pandangan partai politik terhadap media sosial sebagai salah satu alat komunikasi politik untuk mendekati pemilih muda (Gen Y dan Z): Studi kasus PDI-P dan PSI. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(1), 51-66.
- Apriliana, G. (2025). Advokasi gerakan Women's March terhadap kebijakan Indonesia dalam konteks lokalisasi norma kesetaraan gender. 6, 487-498. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.338>
- Arda, R., Yanti, D., Pekerjaan, A., Kupang, S., Timur, N. T., Kesejahteraan, P., Bandung, S., Barat, J., Info, A., Policy, S., Justice, R., Protection, V., & Sentencing, C. (2025). Peran perspektif gender dalam penyusunan kebijakan pemidanaan: Studi kualitatif terhadap kasus kekerasan berbasis gender. 3(1), 824-843. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2351>
- Aula, M. R. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186-201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Azizah, N. (2017). *Gender dan politik*. The Phinisi Press Yogyakarta.
- Azmy, A. S. (2024). *Gender dan politik*. Prenada Media.
- BBC News Indonesia. (2024). Pemilihan gubernur Maluku Utara: Tantangan dan harapan. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/politik/malut2024>.

- BPS. (2024). Indeks pembangunan manusia menurut Kabupaten/Kota, 2022-2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYwIzI=/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html> (January 23, 2024).
- Cárdenas, M. L., & Hedström, J. (2021). Armed resistance and feminist activism. In *Routledge handbook of feminist peace research* (pp. 148-156). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429024160-16>
- CNN Indonesia. (2024). KPU tetapkan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe menang Pilgub Malut 2024.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Towards clarification of a fractured paradigm. *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, 390, 397. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fadhillah, N. (2025, August). Mendobrak langit-langit kaca digital: Representasi kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam media online terhadap persepsi publik. In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi (SENAKOM)* (Vol. 2, No. 2).
- Farkas, X., & Bene, M. (2021). Images, politicians, and social media: Patterns and effects of politicians' image-based political communication strategies on social media. *The International Journal of Press/Politics*, 26(1), 119-142. <https://doi.org/10.1177/1940161220959553>
- Indiarti, I., Juanda, J., & Mahmudah, M. (2025). Pemberitaan fasilitas kampus dalam media daring estetika pers: Analisis framing Robert N. Entman. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 5(2), 428-441. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v5i2.1277>
- Ismoyo, S. L., & Basaevha, M. (2025). Analisis komunikasi politik satire Anies Baswedan di Instagram: Kajian semiotika Roland Barthes. *Communications*, 7(1), 104-127. <https://doi.org/10.21009/communications.7.1.5>
- Jhon, W C. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset. *Mycol Res*, 94(3), 522.
- JUANDANILSYAH, J. (2024). Dinamika strategi komunikasi politik dalam membangun kesadaran publik: Studi pada kampanye Pilkada dan Pilgub 2024 di Kota Mataram. *GANEC SWARA*, 18(4), 1993-1999. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i4.1077>
- Kelompok, R., Pada, M., & Maluku, P. (2025). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 323-342. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4467>
- KOMPASTV. (2024a). Debat publik terakhir calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara 2024. Indonesia: You Tube. <https://www.youtube.com/live/SrWSMPjJfZ4?si=zMgps5WFgzndRU59>
- KOMPASTV. (2024b). LIVE - Debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara 2024. Indonesia: You Tube. <https://www.youtube.com/live/du5rCSHDtTg?si=y-z2vchSX2xmlBT5>
- Krasniqi, E. (2021). Same goal, different paths, different class: Women's feminist political engagements in Kosovo from the mid-1970s until the mid-1990s. *Comparative Southeast European Studies*, 69(2-3), 313-334. <https://doi.org/10.1515/soeu-2021-0014>
- Larasati, Y. G., & Fernando, H. (2025). Women and political power: Gender studies based on bibliometric analysis 2004-2024. 7(May), 39-60. <https://doi.org/10.32332/jsga.v7i01.9941>

- Li, Z., Chen, H., Ma, Q., Li, H., & Gherghina, S. C. (2021). CEO empowering leadership and corporate entrepreneurship: The roles of TMT information elaboration and environmental dynamism. *12*(July), 1-15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.671232>
- Maulid, P. (2022). Analisis feminisme liberal terhadap konsep pendidikan perempuan (studi komparatif antara pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyyah). *Jurnal Riset Agama*, *2*(2), 305-334. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.17534>
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi politik kader perempuan pada pengorganisasian partai-partai politik. *Ijd-Demos*, *4*(3). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323>
- Meifilina, A. (2021). Media sosial sebagai strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam melakukan pendidikan politik. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, *3*(2), 101-110. <https://doi.org/10.33366/jkn.v3i2.80>
- Mohtar Alting. (2024, October 24). Resmi! KPU tetapkan Sherly Tjoanda istri Benny Laos jadi cagub Malut. Detiknews. <https://news.detik.com/pilkada/d-7604091/resmi-kpu-tetapkan-sherly-tjoanda-istri-benny-laos-jadi-cagub-malut>
- Nazrul, N. (2024). Gendered deification: Women leaders and political iconography in Bangladesh. *International Journal of Arts and Humanities*, *2*(1), 43-55. <https://doi.org/10.61424/ijah.v2i1.83>
- Noorikhsan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika internet, media sosial, dan politik di era kontemporer: Tinjauan relasi negara-masyarakat. *Journal of Political Issues*, *5*(1), 95-109. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>
- Nurhanifah, S. (2025). Peran aktivis muda di era digital: Studi kasus Sherly Annavita Rahmi. *Jurnal Deliberatif*, *3*(1), 37-56
- Nurshiva, S., Panuju, R., & Prasetyo, I. J. (2026). Penggunaan Instagram dan Tiktok sebagai media komunikasi politik Sherly Tjoanda dengan konstituennya. *4*(5), 3237-3245. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1519>
- Pas, D. J. Van Der. (2020). Gender differences in political media coverage: A meta-analysis. *70*, 114-143. <https://doi.org/10.1093/joc/jqz046>
- Putri, S., & Wibawa, D. P. (2023). Peran media sosial dalam keterlibatan politik generasi Z. *Indo MathEdu Intellectuals Journal*, *4*(3), 2014-2027. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.461>
- Rahayu, H. T., & Setiawan, B. (2024). Analisis framing Robert N. Entman pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan di media online Detikcom tahun 2022. *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *7*(1). <https://doi.org/10.21831/lektur.v7i1.21036>
- Rahmah, S. (2021). Personal branding Ganjar Pranowo untuk membangun komunikasi politik di media sosial Instagram. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *5*(1), 94-101. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i1.5584>
- Rahmanto, A. N., & Anshori, M. (2025). Membangun citra, mencuri perhatian: Strategi branding politik Sherly Tjoanda di TikTok. *Jurnal Audiens*, *6*(4), 601-615. <https://doi.org/10.18196/jas.v6i4.712>
- Sahrudin Nurdin. (2024). Sejarah baru, Sherly Tjoanda jadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. *Berita Satu*.
- Saputra, I., Banggu, M., & Amalia, D. R. (2025). Kemenangan pasangan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sahe sebagai representasi kelompok minoritas pada pemilihan gubernur dan

- wakil gubernur Maluku Utara 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 323-342. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4467>
- Studi, P., Ilmu, M., Maret, U. S., Rahmanto, A. N., Studi, P., Komunikasi, I., Maret, U. S., Anshori, M., Studi, P., Komunikasi, I., & Maret, U. S. (2025). Membangun citra, mencuri perhatian: Strategi branding politik Sherly Tjoanda di TikTok. 6(4). <https://doi.org/10.18196/jas.v6i4.712>
- Tamim, F. M., & Zamzamy, A. (2023). Strategi komunikasi politik Partai Gerindra dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih muda melalui media sosial Twitter pada Pemilu Tahun 2024. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8040-8046. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3028>
- Titastory.id. (2024). Sherly Tjoanda: Dari perolehan suara hingga manuver politik di Jakarta.
- Tsaniyah, R. W. Kepemimpinan ibu Sherly sebagai gubernur: Representasi perempuan hebat Indonesia di ranah politik.
- Wahyuningtyas, A., Ramadhan, M. W., & Suprihono, M. B. (2025). Efektivitas strategi kampanye pasangan Sherly Laos-Sarbin Sehe di Pilgub Maluku Utara: Kajian media, taktik, dan mobilisasi massa. 6(1), 610-621. <https://doi.org/10.35870/jimik.v6i1.1291>
- Zempi, C. N., Kuswanti, A., & Maryam, S. (2023). Analisis peran media sosial dalam pembentukan pengetahuan politik masyarakat. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 116-123. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.5286>